



**BUPATI SORONG SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


**BUPATI SORONG SELATAN,**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran berbasis kinerja, diperlukan Analisis Standar Belanja (ASB);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) di Lingkungan Kabupaten Sorong Selatan;

- MENINGGAT** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Papua Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM

- Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorng Selatan Nomor

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAGHUKUM
		

- 02 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2022;

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan.
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
4. Anggaran Berbasis Kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan sehingga terdapat keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

5. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah sebagai sarana rujukan penentuan besarnya belanja kegiatan bagi SKPD dalam mengajukan anggaran RKA serta perangkat evaluasi bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Analisis Standar Belanja merupakan alat bantu untuk menghitung alokasi anggaran kegiatan SKPD dikaitkan dengan output yang harus dihasilkan oleh SKPD tersebut sebagai kontribusi bagi pembangunan daerah
6. Standar Satuan Harga (SSH) adalah standar atau pedoman yang berisi jenis barang dan standar harga satuan barang yang digunakan untuk penyusunan RKA/DPA pada semua SKPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP ANALISIS STANDAR BELANJA

#### Pasal 2

*Analisis Standar Belanja (ASB) terdiri dari 2 Kelompok yaitu:*

- (1) Analisis Standar Belanja meliputi Kelompok ASB Non Konstruksi dan Kelompok ASB Konstruksi.
- (2) Kelompok ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) ASB digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun RKA/DPA-SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023.

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	ASISTEN I	KABAG HUKUM
		

- (2) Pelaksanaan ASB akan selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal : 06 SEPTEMBER 2022  
BUPATI SORONG SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
SAMSUDIN ANGGILULI

Diundangkan di Teminabuan  
pada tanggal : 06 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN,



*[Handwritten Signature]*  
DANCE NAUW

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: